

## Determinasi Capaian Pembangunan Desa di Sumatera Barat: Bukti Empiris dari Efektivitas Dana Desa, Efisiensi Belanja Modal, dan Kapasitas Fiskal Daerah

Halkadri Fitra<sup>1\*</sup>, Muhammad Nadhif Faridzan<sup>2</sup>, Salma Taqwa<sup>3</sup>, Dewi Pebriyani<sup>4</sup>,  
Vita Fitria Sari<sup>5</sup>, Fefri Indra Arza<sup>6</sup>

<sup>1,3,4</sup> Sekolah Vokasi, Universitas Negeri Padang, Padang

<sup>2,5,6</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [halkadri@fe.unp.ac.id](mailto:halkadri@fe.unp.ac.id)

---

**Tanggal Masuk:**

01 April 2026

**Tanggal Revisi:**

14 April 2026

**Tanggal Diterima:**

21 Mei 2026

---

**Keywords:** Village Fund Effectiveness; Capital Expenditure Efficiency; Regional Fiscal Capacity; Village Development Index (IDM).

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Fitra, Halkadri et al. (2026). Determinasi Capaian Pembangunan Desa di Sumatera Barat: Bukti Empiris dari Efektivitas Dana Desa, Efisiensi Belanja Modal, dan Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (2), 646-664.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i2.4548>

---

**Abstract**

*Fiscal decentralization implemented through the Village Fund program is expected to promote sustainable improvements in village development. This study examines the effects of Village Fund utilization effectiveness, capital expenditure efficiency, and regional fiscal capacity on village development performance, as measured by the Village Development Index (IDM), in West Sumatra Province. A quantitative causal research design was employed, using panel data regression analysis to assess the relationships among the variables. The results indicate that the effectiveness of Village Fund utilization does not have a statistically significant impact on the IDM. In contrast, capital expenditure efficiency and regional fiscal capacity exhibit positive and significant effects on village development outcomes. These findings suggest that development performance is driven more by the quality of budget management and the strength of regional fiscal capacity than by budget absorption levels alone. From a theoretical perspective, this study reinforces the relevance of the value for money principle and the capacity-based development approach in village development studies. In practical terms, the findings highlight the need for local governments to prioritize improvements in spending efficiency and fiscal capacity in order to enhance the developmental impact of Village Funds.*



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi strategi utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat desa. Untuk tujuan tersebut, pemerintah pusat menyalurkan dana desa sebagai instrumen fiskal guna memperkuat infrastruktur, memberdayakan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi lokal (Sugito; Sartika, 2025). Program ini termuat pada berbagai kebijakan, termasuk Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014 (Pemerintah RI, 2014) yang menyatakan sangat perlunya desentralisasi fiskal untuk mempercepat pembangunan desa. Namun, efektivitas pemanfaatan dana desa masih menjadi bahan diskusi oleh akademisi dan pembuat kebijakan sehingga memunculkan banyak kajian dan penelitian (Fathor. M, 2024; Fitra, Efrizal Syofyan, et al., 2024; Sebrina et al., 2023).

Beberapa studi empiris memperlihatkan bahwa penggunaan dana desa berkontribusi pada pembangunan desa secara keseluruhan, namun dampaknya belum konsisten di semua daerah. Misalnya, penelitian yang pernah dilakukan dengan menggunakan panel data melibatkan 33 provinsi di Indonesia menunjukkan terdapat pengaruh positif dana desa untuk Indeks Desa Membangun (IDM) dalam mendorong pembangunan pedesaan, meskipun faktor lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk juga berperan penting (Rizaldi & M. et.al, 2024). Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian internasional yang menekankan pentingnya *governance* dan *fiscal capacity* dalam mendorong hasil pembangunan (Hilmawan et al., 2023). Namun, terdapat bukti yang memperlihatkan bahwa tanpa penguatan kapasitas kelembagaan di desa, dana desa belum efektif dalam mendorong perubahan yang signifikan pada indikator pembangunan (Adam et al., 2024; Fitra et al., 2023).

Efisiensi belanja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil pembangunan yang optimal. Efisiensi ini tercermin dari kemampuan desa mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk menghasilkan infrastruktur dan layanan dasar, meskipun peningkatan alokasi dana masih sering diiringi persoalan efisiensi akibat lemahnya koordinasi kelembagaan dan kompleksitas regulasi. (Fitra, Erfrizal Syofyan, et al., 2024; Madjid et al., 2025). Hal ini sejalan dengan literatur efisiensi belanja publik yang menegaskan bahwa peningkatan anggaran tidak serta-merta meningkatkan capaian pembangunan tanpa pengelolaan yang efisien (Sugiyarto et al., 2025).

Permasalahan lain muncul pula dalam pengelolaan dana desa, di mana efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dan sistem pengawasan. Keterbatasan kemampuan dalam perencanaan dan pengendalian belanja sering menghambat optimalisasi pemanfaatan dana desa (Cicik Widiyana et al., 2025). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran desa berperan penting dalam meningkatkan kualitas hasil pembangunan (Istifazhuddin & Mardiyanta, 2025). Hal ini menjadikan partisipasi publik dan transparansi anggaran desa sangat perlu dalam meningkatkan akuntabilitas belanja dan capaian pembangunan.

Pada sisi lain, studi empiris mengenai *Village Development Index (Indeks Desa Membangun / IDM)*—indikator resmi yang digunakan pemerintah untuk mengukur status pembangunan desa—menunjukkan bahwa peningkatan nilai IDM tidak selalu sejalan dengan besaran alokasi dana desa (Wisanggeni, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa selain besarnya alokasi, faktor-faktor struktural seperti kapasitas fiskal daerah, kinerja belanja modal, dan kualitas manajemen desa juga berperan untuk mencapai tingkat pembangunan desa.

Studi menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah—yang mencerminkan kemampuan mengelola pendapatan, transfer, dan belanja, berkontribusi penting menentukan keberhasilan pembangunan. Temuan empiris juga mengindikasikan bahwa efisiensi keuangan dan kapasitas fiskal memiliki hubungan signifikan dengan indikator pembangunan, seperti Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) (Prabowo, 2025). Walaupun menggunakan indikator yang berbeda, implikasi teoretisnya menegaskan bahwa kapasitas fiskal yang kuat meningkatkan capaian pembangunan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif.

Fenomena tersebut juga tercermin dalam literature internasional mengenai efisiensi dan efektivitas belanja publik. *Public expenditure review* oleh Bank Dunia menegaskan bahwa *spending better results*—yakni menyediakan layanan publik dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi merupakan kunci dalam mencapai tujuan pembangunan, termasuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan (Worldbank, 2020). Efisiensi belanja modal yang baik berarti setiap belanja dapat menghasilkan manfaat maksimal dalam bentuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa ada kebutuhan untuk memahami peran efektivitas penggunaan Dana Desa, efisiensi belanja modal, dan kapasitas fiskal daerah secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi capaian pembangunan desa yang diukur melalui IDM. Sementara sebagian literatur fokus pada satu dimensi saja (misalnya efektivitas Dana Desa atau efisiensi belanja modal), sedikit penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan ketiga variabel tersebut untuk menjelaskan variasi dalam indikator pembangunan desa lintas wilayah dan waktu. Sehingga meskipun sejumlah studi telah mengevaluasi efektivitas dana desa dan pengaruhnya terhadap pembangunan pedesaan secara umum, masih terdapat beberapa gap empiris dan teoritis yang perlu dijawab:

1. Integrasi Multidimensi Belanja Fiskal

Sebagian besar penelitian hanya menelaah satu aspek, seperti efektivitas Dana Desa atau efisiensi belanja, tanpa mengintegrasikannya dengan kapasitas fiskal daerah dalam satu model empiris yang utuh. (Herdiyansah & Mawar, 2025; Purwanti, 2025).

2. *Outcome* Spesifik IDM

Sebagian besar studi mengandalkan indikator umum seperti HDI atau pertumbuhan ekonomi, sementara pemanfaatan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai variabel outcome masih relatif terbatas dalam kajian empiris. (Wisanggeni, 2025).

3. Metodologi Panel Data Lintas Wilayah

Kajian yang menganalisis dinamika pembangunan desa lintas waktu dan wilayah dengan model data panel masih terbatas, khususnya di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki keragaman kapasitas fiskal antar daerah.

4. Kontribusi Kebijakan Fiskal Lokal

Literatur fiskal daerah umumnya berfokus pada pembangunan regional, sementara kajian tentang peran kapasitas fiskal daerah terhadap pembangunan desa—terutama yang terintegrasi dengan efektivitas dan efisiensi belanja masih terbatas. (Astuti, Dewi, 2025).

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini akan menguji secara empiris determinasi capaian pembangunan desa di Provinsi Sumatera Barat dengan fokus pada efektivitas penggunaan dana desa, efisiensi belanja modal, dan kapasitas fiskal daerah. Sumatera Barat dipilih sebagai wilayah kajian karena mencerminkan variasi fiskal dan pembangunan desa yang signifikan antarunit pemerintahan lokal. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoretis dan praktis dalam literatur pembangunan desa serta menjadi masukan kebijakan bagi pengambil keputusan di tingkat daerah. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh efektivitas Dana Desa terhadap capaian pembangunan desa di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh efisiensi belanja modal terhadap capaian pembangunan desa di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh kapasitas fiskal daerah terhadap capaian pembangunan desa di Provinsi Sumatera Barat?

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Landasan Theory

Penelitian ini menggunakan Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*), yang diperkuat oleh Teori Pengeluaran Publik (*Public Expenditure Theory*) dan Pendekatan *Capacity-Based Development* (Musgrave, 1959; Oates, 1972; UNDP, 2009). Teori desentralisasi fiskal menekankan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyediaan layanan publik (Oates, 1972, 1999). Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dan desa memperoleh ruang yang lebih luas dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal (Tiebout, 1956). Dalam konteks ini, Dana Desa merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dirancang untuk memperkuat kapasitas keuangan desa agar mampu mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Oates, 1999).

Selanjutnya, Teori Pengeluaran Publik menjelaskan bahwa belanja pemerintah akan berdampak optimal terhadap pembangunan apabila dialokasikan secara efisien dan produktif (Musgrave, R. A., & Musgrave, 1989; Musgrave, 1959). Belanja modal, sebagai salah satu bentuk pengeluaran publik yang berorientasi pada penciptaan aset jangka panjang, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan dasar masyarakat desa (Barro, 1990). Efisiensi belanja modal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal secara ekonomis dan tepat sasaran, sehingga output dan outcome pembangunan desa dapat dicapai secara maksimal dengan keterbatasan anggaran yang ada (Musgrave, R. A., & Musgrave, 1989).

Selain itu, pendekatan *Capacity-Based Development* menempatkan kapasitas fiskal sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan lokal. Kapasitas fiskal daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik secara berkelanjutan (Grindle, 1997; UNDP, 2009). Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mendukung pembangunan desa, baik melalui alokasi anggaran pendamping, peningkatan kualitas layanan publik, maupun intervensi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan desa (Besley, T., & Persson, 2011). Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah berfungsi sebagai faktor struktural yang memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dan efisiensi belanja pemerintah dalam mendorong capaian pembangunan desa.

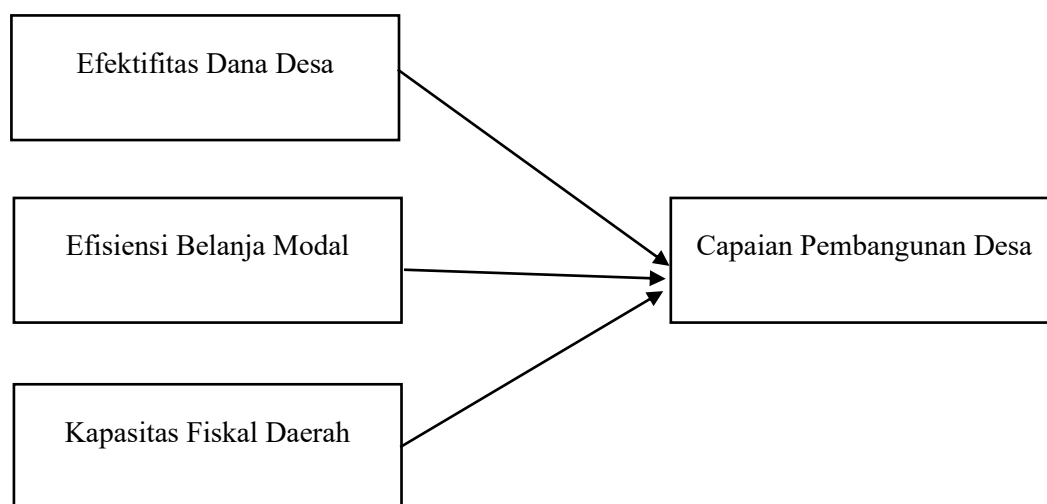
Berdasarkan integrasi ketiga kerangka teoretis tersebut, penelitian ini memandangi capaian pembangunan desa sebagai *outcome* dari interaksi antara efektivitas kebijakan fiskal di tingkat desa (Dana Desa), kualitas pengelolaan pengeluaran publik (efisiensi belanja modal), dan kapasitas keuangan pemerintah daerah (Todaro, M. P., & Smith, 2020). Dengan menggunakan Indeks Desa Membangun sebagai indikator capaian pembangunan desa, penelitian ini berupaya memberikan bukti empiris mengenai bagaimana instrumen fiskal dan kapasitas keuangan pemerintah daerah berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa di Provinsi Sumatera Barat (KemendesPDTT, 2021).

### Kerangka Konseptual

Penelitian mengenai pembangunan desa dan pengelolaan fiskal lokal umumnya berpijak pada teori *public finance*, desentralisasi fiskal, dan *good governance*, yang menempatkan efektivitas dana desa, efisiensi belanja modal, dan kapasitas fiskal daerah sebagai faktor penentu capaian pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Secara konseptual, dana desa berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, di mana efektivitas pemanfaatannya terbukti berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Namun, besarnya alokasi dana belum cukup menjamin keberhasilan pembangunan tanpa didukung perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan belanja yang berkualitas.

Selain itu, efisiensi belanja desa mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengoptimalkan anggaran untuk menghasilkan output pembangunan yang maksimal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa perbedaan tingkat efisiensi belanja menyebabkan variasi hasil pembangunan antarwilayah, meskipun alokasi dana relatif besar. Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah yang kuat memungkinkan pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Kombinasi efektivitas pengelolaan fiskal dan efisiensi belanja modal pada akhirnya berperan penting dalam memperkuat capaian pembangunan desa melalui sinergi dan pemerataan anggaran antarlevel pemerintahan (Amsyah, 2024; Astuti, Dewi, 2025; Hamid & Roy, 2025; Haryati et al., 2025; Panjaitan et al., 2023; Purwanti, 2025; Rokhman; Kamariyah; Pramudiana, 2025; Suleman et al., 2025; Supriadin & Wardan, 2024; Taufiq et al., 2025; Timuneno, T., Lestari, P., & Saputra, 2024). Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

### **Hipotesis Penelitian**

#### **Efektivitas Penggunaan Dana Desa terhadap Capaian Pembangunan Desa**

Efektivitas pengelolaan Dana Desa merupakan faktor kunci dalam pencapaian pembangunan desa, karena besarnya anggaran tidak menjamin keberhasilan tanpa pengelolaan yang tepat, yang tercermin dari keselarasan antara perencanaan dan realisasi, ketepatan sasaran, serta kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Secara teoretis, efektivitas ini mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan desa dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat, sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan peningkatan efisiensi melalui pelimpahan kewenangan, teori pengeluaran publik yang menegaskan pentingnya kualitas belanja pemerintah dalam menentukan keberhasilan pembangunan, serta pendekatan *capacity-based development* yang menyoroti peran kapasitas institusi desa, sehingga semakin efektif

penggunaan Dana Desa maka semakin tinggi capaian pembangunan desa. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H1:** Efektivitas penggunaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian pembangunan desa

### **Efisiensi Belanja Modal terhadap Capaian Pembangunan Desa**

Efisiensi belanja modal mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk menghasilkan output pembangunan yang maksimal dengan biaya minimal, yang dalam kerangka *value for money* menjadi kunci peningkatan kualitas dan keberlanjutan pembangunan desa, khususnya melalui penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, kewenangan pengelolaan anggaran di tingkat desa memungkinkan alokasi belanja yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal sehingga meningkatkan efisiensi, sementara teori pengeluaran publik menegaskan bahwa efisiensi belanja merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan pembangunan. Selain itu, pendekatan *capacity-based development* menjelaskan bahwa efisiensi pengelolaan belanja modal sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, sehingga efisiensi belanja modal dipandang sebagai faktor penentu dalam meningkatkan capaian pembangunan desa. Hipotesis yang diajukan adalah:

**H2:** Efisiensi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian pembangunan desa

### **Kapasitas Fiskal Daerah Terhadap Capaian Pembangunan Desa**

Kapasitas fiskal daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dan mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik, yang sekaligus memperluas ruang fiskal bagi desa untuk melakukan perencanaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan lokal, sementara teori pengeluaran publik menegaskan bahwa kecukupan sumber daya fiskal memengaruhi skala, kualitas, dan efektivitas belanja pembangunan. Selain itu, pendekatan *capacity-based development* memandang kapasitas fiskal sebagai bagian dari kapasitas sistem yang mendukung peningkatan kemampuan desa melalui pembinaan, fasilitasi, dan sinergi program, sehingga kapasitas fiskal yang kuat meningkatkan kualitas pengelolaan belanja dan efektivitas program pembangunan, serta dipandang sebagai determinan penting dalam meningkatkan capaian pembangunan desa. Hipotesis yang diajukan adalah:

**H3:** Kapasitas fiskal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian pembangunan desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode, Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif dan metode kausatif dalam menguji hubungan sebab-akibat variabel independen dengan dependen. Pendekatan ini memungkinkan analisis objektif dan terukur untuk pengaruh efektivitas dana desa, efisiensi belanja modal, dan kapasitas fiskal daerah terhadap capaian pembangunan desa di Provinsi Sumatera Barat dengan teknik statistik inferensial. Unit analisis adalah kabupaten dan kota yang berada di

Provinsi Sumatera Barat. Analisis memanfaatkan data lintas wilayah (*cross-section*) selama periode pengamatan penelitian.

### **Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Penelitian memakai data sekunder kuantitatif. Data meliputi informasi fiskal, keuangan desa dan daerah, serta capaian pembangunan desa yang bersumber dari instansi berwenang. Penggunaan data kuantitatif memungkinkan pengukuran yang konsisten atas efektivitas dana desa, efisiensi belanja modal, kapasitas fiskal daerah, dan capaian pembangunan desa, sehingga analisis statistik menghasilkan temuan yang reliabel dan dapat digeneralisasi pada wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan, mencatat, serta mengolah data secara sistematis dan objektif dalam mendukung analisis kuantitatif (Creswell, J. W., & Creswell, 2022). Data capaian pembangunan desa diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui website <https://sid.kemendesa.go.id/>. Sedangkan data untuk efektivitas dana desa, efisiensi belanja modal dan kapasitas fiskal daerah bersumber Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan melalui website <https://djpk.kemenkeu.go.id/> dan badan statistik nasional Provinsi Sumatera Barat <https://sumbar.bps.go.id/id>

### **Populasi, Sampel dan Variabel Penelitian**

Populasi penelitian adalah pemerintah kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, berjumlah 19. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi: (1) pemerintah kabupaten dan kota yang menerima dana desa selama periode penelitian tahun 2020 sampai 2024; (2) pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun pada tingkat Kabupaten atau Kota; dan (3) Pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki data belanja modal, pendapatan asli daerah, dana transfer dan jumlah penduduk pada periode 2020-2024. Melalui penerapan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 14 pemerintah kota dan kabupaten.

Variabel dependen adalah capaian pembangunan desa, yang diukur menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). Variabel independen pertama adalah efektivitas dana desa (EDD), yang menggambarkan kemampuan desa dalam memanfaatkan dana desa sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan. Variabel independen kedua adalah efisiensi belanja modal (EBM), yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal secara ekonomis dan produktif. Variabel independen ketiga adalah kapasitas fiskal daerah (KFD), yang mencerminkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data diawali dengan gambaran unit yang diteliti, kemudian analisis statistik deskriptif, yang bertujuan memberikan informasi mengenai karakteristik data penelitian, meliputi nilai rata-rata, nilai minimum dan maksimum, serta ukuran penyebaran data seperti standar deviasi. Analisis deskriptif digunakan untuk memahami pola distribusi data serta variasi capaian pembangunan desa dan variabel fiskal di Provinsi Sumatera Barat (Ghozali, 2018). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik utama untuk menguji pengaruh EDD, EBM, dan KFD terhadap IDM. Analisis regresi dipilih karena mampu menjelaskan hubungan kausal antara satu variabel dependen dengan lebih dari

satu variabel independen secara simultan, serta mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, D. N., & Porter, 2021). Model regresi dalam penelitian ini secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IDM_i = \alpha + \beta_1 EDD_i + \beta_2 EBM_i + \beta_3 KFD_i + \varepsilon_i$$

di mana IDM mencerminkan capaian pembangunan desa, EDD merupakan efektivitas Dana Desa, EBM adalah efisiensi belanja modal, KFD adalah kapasitas fiskal daerah, dan  $\varepsilon$  adalah error term.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model regresi diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), sehingga hasil estimasi yang diperoleh bersifat valid dan dapat diinterpretasikan secara ekonometrik (Ghozali, 2018; Gujarati, D. N., & Porter, 2021).

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap capaian pembangunan desa, serta uji simultan (uji F) untuk menilai pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu, koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi capaian pembangunan desa (Wooldridge, 2016).

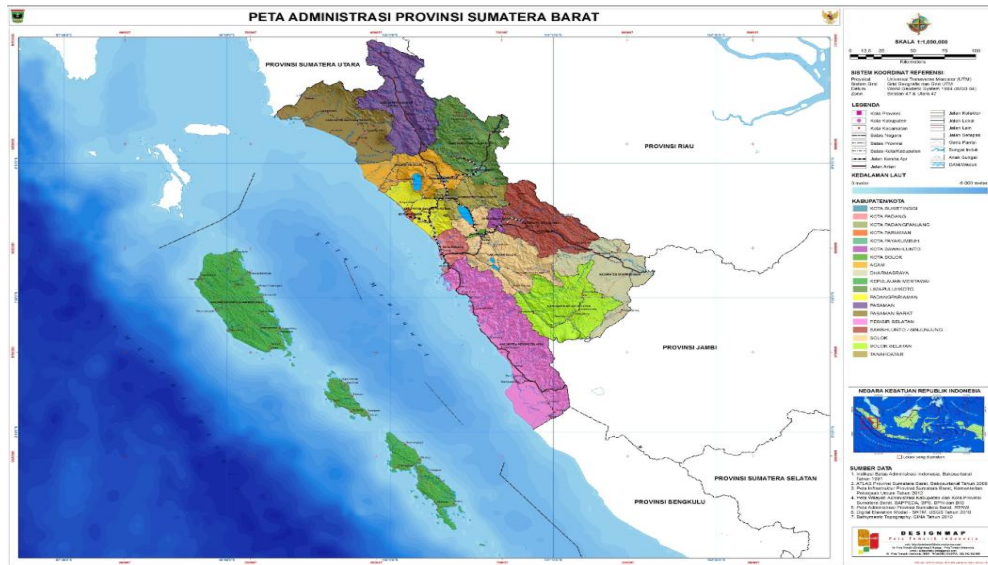
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Profile Daerah Penelitian

Pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi objek penelitian terdiri atas 12 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota yaitu: 1) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2) Kabupaten Pesisir Selatan, 3) Kabupaten Solok, 4) Kabupaten Sijunjung, 5) Kabupaten Tanah Datar, 6) Kabupaten Padang Pariaman, 7) Kabupaten Agam, 8) Kabupaten Lima Puluh Kota, 9) Kabupaten Pasaman, 10) Kabupaten Solok Selatan, 11) Kabupaten Dharmasraya, 12) Kabupaten Pasaman Barat, 13) Kota Pariaman dan 14) Kota Sawahlunto.

Semua kabupaten dan kota tersebut berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan 5 kota lainnya yang tidak menerima dana desa yaitu: 1) Kota Padang, 2) Kota Bukittinggi, 3) Kota Padang Panjang, 4) Kota Solok dan 5) Kota Payakumbuh. Semua pemerintah kabupaten dan kota tersebut dapat dilihat berikut ini:



**Gambar 2. Peta Sumatera Barat(Wordpress, 2015)**

Provinsi Sumatera Barat terletak di sekitar garis khatulistiwa pada koordinat 0°54' LU–3°30' LS dan 98°36'–101°53' BT. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau di sebelah utara, Samudera Hindia di bagian selatan dan barat, serta Provinsi Jambi dan Bengkulu di sebelah timur (BPS, 2025).

### Analisis Statistik Deskriptif

Hasil yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistic	EDD	EBM	KFD	IDM
Mean	0.998386	0.825429	12.99181	0.7398
Median	1.000000	0.857000	12.871500	0.741500
Maximum	1.000000	1.081000	14.295000	0.835000
Minimum	0.965000	0.484000	12.253000	0.634000
Std. Dev.	0.006321	0.148268	0.468925	0.046924
Skewness	-4.399388	-0.552251	0.93359	0.048158
Kurtosis	21.764400	2.285005	3.502087	2.457664
Jarque-Bera	1252.771	5.049166	10.90381	0.884931
Probability	0.000000	0.080092	0.004288	0.64245
Sum	69.88700	57.78000	909.42700	51.78600
Sum Sq. Dev.	0.002757	1.516853	15.17247	0.151931
Observations	70	70	70	70

EDD memiliki nilai rata-rata dan median mendekati 1 dengan variasi yang sangat rendah, menunjukkan data yang sangat homogen. EBM menunjukkan nilai rata-rata di atas 0,8 dengan tingkat variasi sedang. Distribusinya sedikit miring ke kiri dan memiliki bentuk yang mendekati normal. IDM memiliki rata-rata dan median yang hampir sama dengan variasi relatif rendah, menunjukkan data yang stabil dan terpusat. KFD berpusat di sekitar nilai 13 dengan variasi yang moderat. Distribusinya condong ke kanan dan sedikit lebih runcing dibandingkan distribusi normal.

## Uji Chow

Hasil uji Chow sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji CHow**

<b>Redundant Fixed Effects Tests</b>			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
<b>Effects Test</b>	<b>Statistic</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section F	9.529178	(13,53)	0.0000
Cross-section Chi-square	84.362303	13	0.0000

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Cross-section F* sebesar 9.529178 dan *Cross-section Chi-square* sebesar 84.362303, keduanya memiliki nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan antar unit cross-section dalam data panel yang digunakan. Ini mengindikasikan bahwa karakteristik khusus dari masing-masing *cross-section* berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, sehingga model yang mempertimbangkan efek individual (*fixed effect*) memberikan hasil estimasi yang lebih akurat dibandingkan model yang mengasumsikan semua unit bersifat homogen. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah melakukan uji hausman untuk memastikan model yang paling tepat.

## Uji Hausman

Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Hausman**

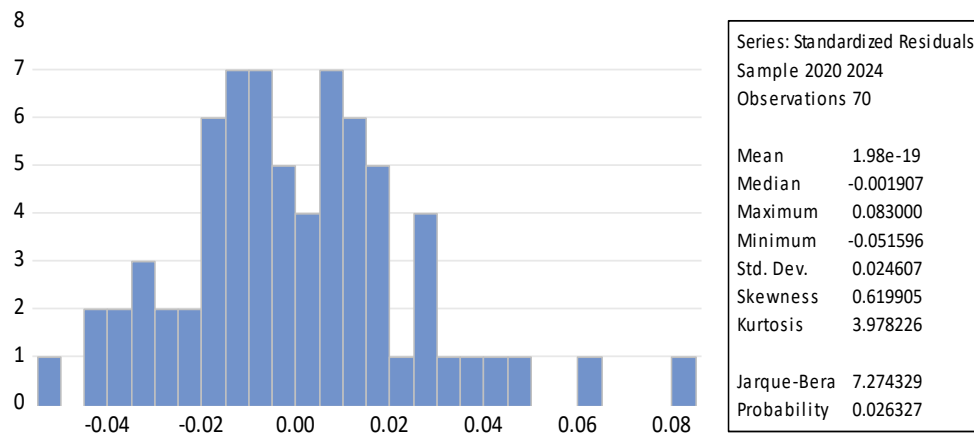
<b>Correlated Random Effects - Hausman Test</b>			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
<b>Test Summary</b>	<b>Chi-Sq. Statistic</b>	<b>Chi-Sq. d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section random	8.915878	3	0.0304

Tabel 3 menunjukkan nilai *Chi-Square Statistic* sebesar 8.915878 dengan derajat kebebasan (df) = 3 dan probabilitas (p-value) = 0.0304. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$ . Artinya, model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibanding *Random Effect Model* (REM). Terdapat perbedaan yang signifikan antara estimasi *fixed effect* dan *random effect*, sehingga efek individual (*cross-section*) dalam model tidak bersifat acak, melainkan memiliki korelasi dengan variabel independen. Sehingga perlu dilanjutkan ke uji asumsi klasik.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Hasil uji normalitas seperti terlihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 3. Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil uji normalitas Jarque-Bera, diperoleh nilai JB sebesar 7.274329 dengan probabilitas 0.026327, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa residual model tidak berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Akan tetapi, menurut Gujarati & Porter (2013), asumsi normalitas tidak menjadi hal yang krusial ketika ukuran sampel cukup besar. Dalam kondisi tersebut, dapat diterapkan asumsi Central Limit Theorem, yang menyatakan bahwa jika jumlah sampel melebihi 30, maka distribusi data dapat dianggap mendekati normal. Oleh karena itu, penelitian ini tetap dapat dilanjutkan menggunakan asumsi tersebut meskipun distribusi data tidak sepenuhnya normal. (Gujarati, D. N., & Porter, n.d., 2013)

### Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

	EDD	EBM	KFD
EDD	1.000000	0.138991	0.138991
EBM	0.325416	1.000000	0.023643
KFD	0.138991	0.023643	1.000000

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0.80, masing-masing sebesar 0.325416 antara EDD dan EBM, 0.138991 antara EDD dan KFD, serta 0.023643 antara EBM dan KFD. Nilai-nilai korelasi yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linier yang kuat antarvariabel independen dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi panel tidak mengalami masalah multikolinearitas, sehingga setiap variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara independen tanpa saling mempengaruhi secara signifikan.

### Uji Heteroskedastisitas

#### 1) Metode Glejser

Hasil uji sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Dependent Variable: ABS\_RES  
Method: Panel Least Squares  
Date: 11/09/25 Time: 16:26  
Sample: 2020 2024  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 14  
Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.426404	0.381706	1.117099	0.2690
EDD	-0.513277	0.298349	-1.720390	0.0912
EBM	0.026461	0.015717	1.683615	0.0981
KFD	0.006404	0.017646	0.362920	0.7181

Hasil uji heteroskedastisitas Tabel 5 memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas (*p-value*) lebih besar dari 0.05, yaitu 0.0912 untuk EDD, 0.0981 untuk EBM, dan 0.7181 untuk KFD. Nilai probabilitas tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual (*ABS\_RES*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, artinya varians residual bersifat homogen atau konstan di seluruh pengamatan, sehingga model memenuhi asumsi klasik dalam regresi yang menjamin estimasi parameter bersifat efisien dan tidak bias.

2) Metode White

Hasil uji sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Metode White**

**Heteroskedasticity Test: White**  
Null hypothesis: Homoskedasticity

Statistic	Value	Test Probability	Prob.
F-statistic	1.171305	Prob. F(9,60)	0.3297
Obs*R-squared	10.46079	Prob. Chi-Square(9)	0.3145
Scaled explained SS	82.02820	Prob. Chi-Square(9)	0.0000

Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode White menunjukkan bahwa nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0.3297 dan *ObsR-squared\** sebesar 0.3145, keduanya lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti hipotesis nol yang menyatakan adanya homoskedastisitas tidak dapat ditolak, sehingga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, varians dari residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan, menandakan bahwa model regresi panel memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas dan menghasilkan estimasi yang efisien serta dapat dipercaya untuk analisis inferensial selanjutnya.

**Uji Autokorelasi**

Hasil uji adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi**

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Variable	Value	Variable	Value
R-squared	0.725005	Mean dependent var	0.739800
Adjusted R-squared	0.641987	S.D. dependent var	0.046924
S.E. of regression	0.028077	Akaike info criterion	-4.100233
Sum squared resid	0.041780	Schwarz criterion	-3.554170
Log likelihood	160.5081	Hannan-Quinn criter.	-3.883330
F-statistic	8.733161	Durbin-Watson stat	1.271914
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Tabel 7 menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.271914, yang berada di bawah nilai 2. Nilai ini mengindikasikan adanya kecenderungan autokorelasi positif ringan pada model regresi panel. Namun demikian, karena nilainya masih berada dalam batas toleransi (antara 1 dan 3), maka autokorelasi yang terjadi tidak dianggap serius atau mengganggu validitas model secara keseluruhan. Dengan demikian, model regresi ini dapat dinyatakan relatif bebas dari masalah autokorelasi yang berarti.

**Uji Regresi Model Data Panel**

Hasil uji sebagai berikut:

Dependent Variable: IDM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 11/09/25 Time: 17:56  
 Sample: 2020 2024  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 14  
 Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.023382	0.831458	-0.028121	0.9777
EDD	-0.759567	0.649885	-1.168773	0.2477
EBM	0.086908	0.034235	2.538557	0.0141
KFD	0.111592	0.038437	2.903267	0.0054

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Variable	Value	Variable	Value
R-squared	0.725005	Mean dependent var	0.739800
Adjusted R-squared	0.641987	S.D. dependent var	0.046924
S.E. of regression	0.028077	Akaike info criterion	-4.100233
Sum squared resid	0.041780	Schwarz criterion	-3.554170
Log likelihood	160.5081	Hannan-Quinn criter.	-3.883330
F-statistic	8.733161	Durbin-Watson stat	1.271914
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Gambar 4. Hasil Uji Regresi Model Data Panel**

Berdasarkan Gambar 4, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$IDM_{it} = -0.023382 - 0.759567(EDD_{it}) + 0.086908(EBM_{it}) + 0.111592(KFD_{it}) + \epsilon_{it}$$

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik, dengan nilai R-squared sebesar 0.725 yang berarti 72,5% variasi dalam IDM dapat dijelaskan oleh variabel EDD, EBM, dan KFD. Secara parsial, variabel EBM dan KFD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM dengan nilai probabilitas masing-masing 0.0141 dan 0.0054, yang

menunjukkan bahwa peningkatan kedua variabel tersebut mendorong peningkatan IDM. Sementara itu, variabel EDD memiliki koefisien negatif (-0.759567) namun tidak signifikan secara statistik ( $p$ -value 0.2477), sehingga tidak terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap IDM dalam periode penelitian. Secara keseluruhan, uji F menunjukkan nilai probabilitas 0.000000 yang menandakan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IDM, sehingga model ini dapat dianggap layak untuk digunakan dalam analisis hubungan antara faktor-faktor yang diuji dengan IDM.

## **Uji Hipotesis**

### **Uji koefisien determinasi**

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R-squared sebesar 0,725 dan Adjusted R-squared sebesar 0,642, yang mengindikasikan bahwa 72,5% variasi IDM dapat dijelaskan oleh EDD, EBM, dan KFD, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R-squared yang relatif tinggi menunjukkan model tetap stabil dan relevan, sehingga mampu menjelaskan hubungan antarvariabel dengan baik, di mana variasi IDM terutama dipengaruhi oleh RBMP dan KFD.

### **Uji F**

Pada hasil uji F terlihat nilai F-statistic sebesar 8,73 dengan probabilitas 0,000, yang menandakan bahwa model signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Temuan ini mengonfirmasi bahwa EDD, EBM, dan KFD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IDM, sehingga model regresi panel dinilai layak dan mampu menjelaskan hubungan kolektif antarvariabel penelitian.

### **Uji t**

Variabel EDD dengan nilai koefisien sebesar -0.759567 dan nilai  $p$ -value 0.2477 lebih besar dari 0.05, menunjukkan variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM. Koefisien negatif mengindikasikan adanya hubungan berlawanan arah, artinya setiap peningkatan EDD cenderung menurunkan nilai IDM, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Sehingga dapat disimpulkan EDD tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IDM dalam model regresi ini.

Variabel EBM dengan nilai koefisien sebesar 0.086908 dan nilai  $p$ -value 0.0141 lebih kecil dari 0.05, diartikan bahwa EBM berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Nilai koefisien positif mengindikasikan setiap peningkatan EBM akan diikuti dengan peningkatan IDM. Sehingga EBM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM.

Variabel KFD dengan koefisien 0.111592 dan nilai  $p$ -value 0.0054, artinya signifikan pada tingkat kepercayaan 1%. Ini menunjukkan bahwa KFD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM, artinya setiap peningkatan KFD akan meningkatkan nilai IDM secara nyata. Sehingga disimpulkan bahwa KFD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IDM.

## **Pembahasan Penelitian**

### **Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa (EDD) tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian pembangunan desa (IDM). Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya realisasi anggaran secara administratif belum tentu mencerminkan peningkatan kualitas pembangunan desa, karena serapan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan outcome pembangunan.

Temuan tersebut sejalan dengan studi sebelumnya yang menegaskan bahwa dampak Dana Desa terhadap pembangunan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, kualitas perencanaan, dan tata kelola, bukan semata pada tingkat realisasi anggaran (Adam et al., 2024;

Andini et al., 2025; Widyastuti et al., 2025). Dalam konteks Sumatera Barat, Dana Desa lebih berperan sebagai prasyarat awal (*necessary condition*), namun belum menjadi faktor penentu utama (*sufficient condition*) peningkatan IDM. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan Dana Desa perlu diarahkan pada pencapaian outcome dan dampak pembangunan, bukan hanya aspek input dan output anggaran.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian pembangunan desa dapat dijelaskan melalui Teori Desentralisasi Fiskal yang menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal tidak otomatis meningkatkan kinerja tanpa dukungan kapasitas institusional, sehingga meskipun realisasi anggaran tinggi, keterbatasan dalam perencanaan, pengawasan, dan tata kelola membuat alokasi belum efisien dan berdampak pada IDM. Dalam perspektif Teori Pengeluaran Publik, temuan ini menguatkan bahwa besarnya anggaran (input) tidak menjamin kualitas belanja karena keberhasilan lebih ditentukan oleh efektivitas dan produktivitas dalam menghasilkan outcome, sementara penggunaan Dana Desa di Sumatera Barat masih berorientasi pada penyerapan anggaran (*output*). Sementara itu, menurut Pendekatan Capacity-Based Development, kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan desa masih menjadi faktor pembatas utama dalam mengonversi sumber daya fiskal menjadi hasil pembangunan, sehingga Dana Desa lebih berfungsi sebagai *necessary condition* daripada *sufficient condition*, dan peningkatan kapasitas institusi menjadi kunci agar berdampak signifikan terhadap capaian pembangunan desa.

### **Pengaruh Efisiensi Belanja Modal Terhadap Capaian Pembangunan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi belanja modal (EBM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian pembangunan desa. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan belanja modal berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa, sejalan dengan Teori Pengeluaran Publik yang menekankan pentingnya efisiensi dalam memaksimalkan dampak belanja pemerintah (Musgrave, R. A., & Musgrave, 1989).

Hasil ini konsisten dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa efisiensi belanja publik berkontribusi signifikan terhadap kinerja pembangunan, bahkan dalam kondisi keterbatasan fiskal, serta menegaskan bahwa kualitas belanja lebih menentukan dibandingkan besarnya anggaran (Haryati et al., 2025; Suleman et al., 2025; Worldbank, 2020). Dengan demikian, peningkatan IDM di Sumatera Barat lebih dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan belanja modal, sehingga kebijakan penganggaran desa perlu difokuskan pada prinsip *value for money* dan penguatan evaluasi belanja.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efisiensi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian pembangunan desa dapat dijelaskan melalui Teori Desentralisasi Fiskal, yang menekankan bahwa kewenangan pengelolaan anggaran di tingkat lokal memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih responsif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan output pembangunan yang optimal dan meningkatkan IDM. Temuan ini juga sejalan dengan Teori Pengeluaran Publik yang menegaskan bahwa kualitas dan efisiensi belanja, bukan sekadar besarnya anggaran, menjadi penentu utama keberhasilan pembangunan melalui prinsip *value for money*. Selain itu, dalam perspektif *Capacity-Based Development*, efisiensi belanja modal mencerminkan kapasitas institusi desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi anggaran secara efektif, sehingga desa dengan kapasitas yang baik mampu menghasilkan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan capaian pembangunan desa, menjadikan efisiensi belanja modal sebagai indikator penting yang menghubungkan kapasitas institusional dan kualitas pengelolaan keuangan dengan keberhasilan pembangunan.

## **Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Terhadap Capaian Pembangunan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah (KFD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian pembangunan desa, menegaskan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah merupakan faktor struktural penting dalam keberhasilan pembangunan. Temuan ini mendukung pendekatan *capacity-based development* yang menempatkan kapasitas fiskal sebagai prasyarat efektivitas kebijakan, karena daerah dengan kapasitas fiskal kuat memiliki fleksibilitas anggaran lebih besar untuk mendukung pembangunan desa secara adaptif (UNDP, 2009).

Hasil ini sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan keterkaitan signifikan antara kapasitas fiskal, efisiensi keuangan daerah, dan indikator pembangunan, baik pada level nasional maupun lintas negara (Astuti, Dewi, 2025; Besley, T., & Persson, 2011; Prabowo, 2025; Todaro, M. P., & Smith, 2020). Dengan demikian, dalam konteks Sumatera Barat, kapasitas fiskal daerah berperan sebagai *enabling factor* yang memperkuat efektivitas dan efisiensi belanja desa dalam meningkatkan IDM.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian pembangunan desa dapat dijelaskan melalui Teori Desentralisasi Fiskal yang menegaskan bahwa keberhasilan pelimpahan kewenangan keuangan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah, di mana kapasitas fiskal yang kuat memberikan ruang anggaran yang lebih fleksibel dan responsif untuk mendukung pembangunan desa. Dalam perspektif Teori Pengeluaran Publik, kapasitas fiskal yang tinggi memungkinkan peningkatan skala, komposisi, dan kualitas belanja pemerintah sehingga memperbesar dampak pembangunan dan memastikan belanja publik menghasilkan outcome yang optimal. Sementara itu, berdasarkan *Pendekatan Capacity-Based Development*, kapasitas fiskal merupakan bagian dari kapasitas sistem yang berfungsi sebagai *enabling factor* dalam memperkuat dukungan, sinergi, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak hanya menjadi sumber pendanaan tetapi juga faktor strategis dalam meningkatkan capaian pembangunan desa (IDM).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa EDD (Efektifitas Dana Desa) tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM (Indeks Desa Membangun), sedangkan variabel EBM (Efisiensi Belanja Modal) dan KFD (Kapasitas Fiskal Daerah) berpengaruh positif signifikan terhadap IDM (Indeks Desa Membangun).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka pemerintah perlu menggeser fokus pengelolaan dana desa dari sekadar pencapaian tingkat serapan anggaran menuju peningkatan kualitas hasil pembangunan. Evaluasi kinerja dana desa sebaiknya menekankan pencapaian outcome dan dampak pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya kepatuhan administratif. Selain itu, peningkatan efisiensi belanja modal perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran desa, mengingat variabel ini terbukti memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan capaian pembangunan desa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, penerapan prinsip *value for money*, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja modal. Di sisi lain, penguatan kapasitas fiskal daerah juga menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan desa, karena kapasitas fiskal yang lebih baik memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan desa secara lebih optimal dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., Sambodo, M. T., Purwanto, P., Purnagunawan, R. M., Sarana, J., Ermawati, T., Saptia, Y., Soekarni, M., Adityawati, S., Thoha, M., & Suryanto, J. (2024). Village fund and Indonesia rural development: Rethinking institutional capacity and governance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(14), 9875. <https://doi.org/10.24294/jipd9875>
- Amsyah, U. S. (2024). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE*, 1(5), 285–292. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.391>
- Andini, M., Ramadhan, M. R., & Barisan, B. (2025). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023. *Responsive*, 8(3), 489–502. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.65591>
- Astuti, Dewi, N. (2025). Determinants of Local Government Financial Independence: A Literature Review. *International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 5(3), 1718–1727. <https://doi.org/https://doi.org/10.52121/ijessm.v5i3.943>
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103–S125. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/261726>
- Besley, T., & Persson, T. (2011). *Pillars of prosperity: The political economics of development clusters*. Princeton University Press.
- BPS. (2025). *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025* (55th ed.). BPS Provinsi Sumatera Barat.
- Cicik Widiyana, Zaenudin Mansyur, & Baiq Ratna Mulhimmah. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 235–248.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.)*. Sage Publications.
- Fathor. M. (2024). Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Kolor. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(3), 106–114.
- Fitra, H., Mulyani, E., Taqwa, S., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Pelatihan Peningkatan Pemahaman Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Nagari) Di Kabupaten Agam. *Communnity Development Journal*, 4(4).
- Fitra, H., Syofyan, Efrizal, Masdupi, E., Mulyani, E., Taqwa, S., & Halmawati. (2024). The Influence of competence and organizational commitment on village fund management accountability with transparency as a mediating variable. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 14(1), 95–110.
- Fitra, H., Syofyan, Erfriзал, Masdupi, E., Mulyani, E., Taqwa, S., & Halmawati, H. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1526. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1906>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Cetakan VIII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (n.d.). *Basic econometrics (6th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Basic econometrics (5th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2021). *Essentials of econometrics (4th ed.)*. Sage Publications.

- Hamid, F., & Roy, T. (2025). Unveiling Sociocultural Barriers to Breast Cancer Awareness Among the South Asian Population: Case Study of Bangladesh and West Bengal, India. *JMIR Human Factors*, 12. <https://doi.org/10.2196/53969>
- Haryati, D. C., Nurpiji, N., Masitoh, G., Saputra, W., & Subarkah, T. (2025). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia: Pendekatan Data Panel. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 139–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2185>
- Herdiyansah, A. G. 1, & Mawar. (2025). Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Eksistensi Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 7(1), 959–970. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1>
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
- Istifazhuddin, A. H., & Mardiyanta, A. (2025). Evaluation of the implementation of the village fund allocation policy. *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.61511/ersud.v2i1.2025.1779>
- KemendesPDTT. (2021). *Indeks Desa Membangun: Konsep, dimensi, dan indikator*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Madjid, T., Waisitiono, S., Supriatna, T., & Prabowo, H. (2025). Model of effective and efficient village fund management policy in Indonesia. *Interdisciplinary Social Studies*, 3(4). <https://doi.org/10.55324/iss.v3i4.735>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice (5th ed.)*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Panjaitan, P. D., Damanik, H., & Simalungun, U. (2023). *Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bah Damar Kecamatan*. 5(1), 60–70. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.566>
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38582/Uu-No-6-Tahun-2014>.
- Prabowo, O. (2025). Pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(5), 2328–2337. <https://doi.org/https://doi.org/10.60036/jbm.776>
- Purwanti, D. N. (2025). Indonesian Treasury Review the Influence of Local Government Spending and Village. *Indonesian Treasury Review*, 10(1), 80–93. <https://doi.org/10.33105/itrev.v10i1.843>
- Rizaldi, & M. et.al. (2024). From Budget to Prosperity: Analyzing the Village Fund's Contribution to Rural Advancement in Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 12(2), 178–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jjiae.2024.012.02.2>
- Rokhman; Kamariyah; Pramudiana. (2025). Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(6), 274–297. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1289>

- Sebrina, N., Helmy, H., Mesta, H. A., Fitra, H., & Triani, M. (2023). Peningkatan Kapasitas Pemahaman Aparatur Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam tentang Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa. *Manaruko: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 85–92. <https://doi.org/10.24036/manaruko.v2i2.21>
- Sugito; Sartika. (2025). Implementation of Village Fund Policy in The Development of Tourist Villages to Encourage Village Independence. *Golden Ratio*, 5(4), 943–954. <https://goldenratio.id/index.php/grdis%0AISSN>
- Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the gap: Dynamics of Indonesia's public expenditure performance in economically lagging districts. *Economic Analysis and Policy*, 85(February), 2299–2318. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014>
- Suleman, M., Rahman, Z. ;, & Hasan, W. (2025). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan APBDes di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2), 246–252. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i2.3980>
- Supriadin, S., & Wardan, W. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan. *Economica Insight*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v1i1.17>
- Taufiq, M., Ichsan, U., & Rappang, S. (2025). *Volume 3 No 1 Tahun 2025 Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Village Fund Management in Sipodeceng Village, Baranti Dist.* 3(1), 57–66. <https://ojs.paser.institute/index.php/PIAF/article/view/95>
- Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/257839>
- Timuneno, T., Lestari, P., & Saputra, A. (2024). Pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 112–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.xxxx/jkp.v15i2.xxx>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development (13th ed.)*. Pearson Education.
- UNDP. (2009). *Capacity development: A UNDP Primer*. United Nations Development Programme.
- Widyastuti, R. S., Wisanggeni, P., Rejeki, S., & Dewi Pancawati, M. B. (2025). *Big village fund, small citizen participation*. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/en-dana-desa-besar-partisipasi-warga-kecil>
- Wisanggeni, S. P. S. R. R. S. W. D. I. (2025). Unequal Results of a Decade of Village Funds. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/en-hasil-timpang-satu-dekade-dana-desa>
- Wordpress. (2015). *Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat*. <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/03/13/administrasi-provinsi-sumatera-barat/>
- WorldBank. (n.d.). *Spending for better results*. World Bank Group.
- Worldbank. (2020). *Spending For Better Results*. [www.worldbank.org/idper](http://www.worldbank.org/idper)